

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)****Status Verifikasi Administratif Lengkap**

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AFDHAL KHALILULLAH
2. Jabatan : WAKIL WALIKOTA
3. NHK : 968221

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **7.721.010.000**

1. Bangunan Seluas 94 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH ,
HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL
SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah Seluas 170 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL
SENDIRI Rp. 510.000.000
4. Tanah Seluas 1066 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH ,
HASIL SENDIRI Rp. 533.000.000
5. Tanah Seluas 11729 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL
SENDIRI Rp. 586.450.000
6. Tanah Seluas 16786 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL
SENDIRI Rp. 839.300.000
7. Tanah Seluas 16416 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL
SENDIRI Rp. 984.960.000
8. Tanah Seluas 2478 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH ,
HASIL SENDIRI Rp. 867.300.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **1.660.000.000**

1. LAINNYA, HONDA CRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
600.000.000



2. MOTOR, VESPA VESPA PIAGGIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 60.000.000
3. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
1.000.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 159.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 130.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 9.670.310.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 9.670.310.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.